

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis, 10 Januari 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman 4)	Kamis, 10 Januari 2019	Berita Foto	Peresmian Dermaga TNI Angkatan Laut, Tawiri, Ambon, Maluku pada Rabu (9/1).
2	Kompas (halaman 1)	Kamis, 10 Januari 2019	Patahan Melewati Perumahan dan Sekolah	Jutaan warga di Pulau Jawa tidak menyadari tinggal di atas patahan aktif. Selain di sesar Lembang, Jawa Barat, keberadaan sesar aktif yang membelah kota-kota besar di Jawa ini belum terpetakan secara detail. Di Semarang Jawa Tengah, jalur sesar ini diketahui melalui kawasan perumahan. "Studi untuk mendetailkan jalur sesar di Semarang sudah kami lakukan beberapa tahun terakhir dan masih berlanjut. Peta detailnya belum bisa kami rilis, tetapi secara umum lokasi patahannya di sekitar gunung Kebo" Kata Peneliti Gempa Bumi UGM, Gayatri Indah Marliyani, Rabu (9/1). Saat ini penelitian tersebut, menurut Gayatri terkendala karena sekitar jalur sesar ini sudah jadi perumahan. "Banyak yang tertutup conblock dan bangunan, Sebagai peneliti, kami merasa dilemma juga. Di satu sisi kajiannya masih jalan, namun di sisi lain kami yakin kawasan ini membahayakan untuk hunian" tuturnya. Tuturnya.
3	Kompas (halaman 1)	Kamis, 10 Januari 2019	IKCI 2018: Penghargaan Terhadap 12 Kota Cerdas	Sebanyak 12 kota menerima penghargaan Indeks Kota Cerdas Indonesia 2018 yang diberikan Kompas, Rabu (9/1). Penghargaan diberikan kepada kota yang menerapkan konsep kota cerdas berdasarkan penilaian dan pembobotan enam dimensi yang dikembangkan Boyd Cohen, Pegiat Kota Cerdas Internasional. Keenam dimensi itu mencakup lingkungan cerdas, mobilitas, pemerintahan, ekonomi, masyarakat, dan kualitas hidup. dimensi masyarakat dengan indicator keterhubungan internet, penetrasi telepon, seluler, partisipasi warga, tingkat pendidikan, imigrasi, dan pekerjaan industry kreatif memperoleh pembobotan skor paling tinggi. 12 kota dengan skor tertinggi terbagi dalam 4 kategori, yaitu: Kota Metropolitan (Peringkat 1-3): Surabaya, Semarang, Tangerang Selatan. Kota Besar (Denpasar, Surakarta, Malang), Kota Sedang: Manado, Salatiga, Yogyakarta. dan Kota Kecil (Padang Panjang, Sungai Penuh, Solok).
4	Kompas (halaman 10)	Kamis, 10 Januari 2019	Mitigasi Kunci Penanganan Bencana	Mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi kunci penanggulangan bencana di Indonesia yang terus terjadi. Hal itu menjadi tugas berat ke depan bagi pemimpin baru BNPB.
5	Kompas (halaman 14)	Kamis, 10 Januari 2019	Mengatasi Problem Akses	Pariwisata menjadi sector yang diharapkan menyumbang devisa dalam waktu singkat dan jumlah besar. Namun pengembangannya menghadapi kendala, antara lain terkait akses. Walaupun sudah beberapa kali menyabet penghargaan terbaik di ajang internasional, pariwisata Indonesia belum jadi yang pertama. Di ASEAN saja Indonesia kalah dari Thailand untuk

				jumlah kunjungan turis asing, dan kalah dari Malaysia untuk wisata halal. Padahal potensi dan budayanya lebih unggul. Indonesia kaya akan semua yang bisa dijual untuk pariwisata. Namun aksesibilitas masih menjadi kendala baik bagi wisatawan mancanegara maupun local meski pemerintah gencar membangun infrastruktur beberapa tahun terakhir. Kementerian PUPR dan Kemenhub misalnya, mengerahkan anggaran untuk membangun akses ke lokasi pariwisata. Sementara Kementerian ESDM menyediakan infrastruktur kelistrikan.
6	Kompas (halaman 16)	Kamis, 10 Januari 2019	Dibuka Opsi Relokasi Mandiri Bagi Warga	Penyintas boleh membangun rumah di lahan pribadi. Biaya yang diberikan sama dengan pembangunan rumah di lahan relokasi pemerintah. Relokasi pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di Kota Palu bisa dilakukan di lahan pribadi atau relokasi mandiri. Hal itu untuk menjaga ikatan penyintas bencana dengan lingkungan sosial. “ Yang terpenting lahan yang akan dibangun bukan termasuk zona merah atau zona terlarang” Kata Kepala Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.
7	Kompas (halaman 16)	Kamis, 10 Januari 2019	Berita Foto	Peresmian Dermaga TNI Angkatan Laut, Tawiri, Ambon, Maluku pada Rabu (9/1).
8	Kompas (halaman 17)	Kamis, 10 Januari 2019	Infrastruktur : Bendungan Logung Dioptimalkan	Bendungan logung di Kudus Jawa Tengah dilengkapi sistem pemantauan termutakhir yang akan menyediakan informasi kondisi volume tampungan. Sistem yang juga diterapkan pada 17 bendungan lain nya di Jateng tersebut bakal mengoptimalkan fungsi infrastruktur bendungan. BEndungan logung saat ini sedang tahap pengisian setelah pengisian awal dilaksanakan pada 18 Desember 2018. Sebelum beroperasi penuh, bendungan dengan daya tampung 20.15 juta meter kubik itu melewati proses sertifikasi dahulu. Kepala BBWS Pemali Juana, Rubhan Rizziatno mengatakan sistem pemantauan itu merupakan program Ditjen SDA Kementerian PUPR. Dari situ data pemantauan semua bendungan bakal terkoneksi ke Pusat Bendungan.
9	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Kamis, 10 Januari 2019	Jalan Tol: Japek Selatan Segera Dibangun	PT Jasamarga Japek Selatan segera memulai pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan seiring dengan akan diumumkannya kontraktor proyek tersebut dalam waktu dekat. Direktur KEuangan dan Administrasi PT Jasamarga Japek Selatan, I.B.K Yudharta mengatakan bahwa Penentuan kontraktor Japek II selatan tinggal menunggu hasil pengumuman lelang kontraktor. Beberapa waktu lalu, Yudharta mengatakan bahwa perusahaan sudah merilis pengumuman lelang di Media massa dan laman perseroan terkait dengan lelang kontraktor proyek ini.
10	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Kamis, 10 Januari 2019	WIKa bidik 2 Bendungan	PT. Wijaya Karya Tbk membidik dua kontrak pembangunan bendungan sepanjang tahun ini, Direktur Operasi 1 PT. Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan bahwa perseroan belum

				bisa memproyeksi nilai kontrak pembangunan yang ingin diraih pada tahun ini.
11	Bisnis Indonesia (halaman 8)	Kamis, 10 Januari 2019	Tol Penghubung Provinsi: Jateng Setujui Ruas Bawen-DIY	Pemprov Jateng akhirnya menyetujui pembangunan jalan tol Bawen- Yogyakarta dan Solo-Yogyakarta. PEmprov Jateng berharap agar Exit tol Tetap dekat dengan bangunan cagar budaya. Adapun tol Bawen-Yogyakarta sepanjang 77 km ini dimulai dari Mbarawa, Pringsurat, Magelang, dan Mungkid. Di Yogyakarta melewati Bendung, Karangtalun, Minggir, dan Sleman. kemudian memanjang sampai ringroad utara. Total Investasi diperkirakan lebih dari Rp. 12,13 triliun. adapun tol Solo-Yogyakarta penjangnya mencapai 54 Km dengan nilai investasi Rp. 19 triliun.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 4)		
Resume	Peresmian Dermaga TNI Angkatan Laut, Tawiri, Ambon, Maluku pada Rabu (9/1).		

► **DERMAGA TNI-AL TAWIRI**



Antara/trasc mulyawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (*kedua kiri*) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Ismail Usemahu (*dari kiri*), Gubernur Maluku Said Assagaff, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon Laksma

TNI Antongan Simatupang menekan tombol sirene saat meresmikan Dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri, Ambon, Maluku, Rabu (9/1). Dermaga berkapasitas 15.000 DWT tersebut memiliki panjang 250 meter yang dibangun oleh Kementerian PUPR dengan anggaran Rp121 miliar.

Judul	Patahan Melewati Perumahan dan Sekolah	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 1)		
Resume	<p>Jutaan warga di Pulau Jawa tidak menyadari tinggal di atas patahan aktif. Selain di sesar Lembang, Jawa Barat, keberadaan sesar aktif yang membelah kota-kota besar di Jawa ini belum terpetakan secara detail. Di Semarang Jawa Tengah, jalur sesar ini diketahui melalui kawasan perumahan. "Studi untuk mendetailkan jalur sesar di Semarang sudah kami lakukan beberapa tahun terakhir dan masih berlanjut. Peta detailnya belum bisa kami rilis, tetapi secara umum lokasi patahannya di sekitar gunung Kebo" Kata Peneliti Gempa Bumi UGM, Gayatri Indah Marliyani, Rabu (9/1). Saat ini penelitian tersebut, menurut Gayatri terkendala karena sekitar jalur sesar ini sudah jadi perumahan. "Banyak yang tertutup conblock dan bangunan, Sebagai peneliti, kami merasa dilemma juga. Di satu sisi kajiannya masih jalan, namun di sisi lain kami yakin kawasan ini membahayakan untuk hunian" tuturnya. Tuturnya.</p>		

MITIGASI BENCANA

Patahan Melewati Perumahan dan Sekolah

JAKARTA, KOMPAS — Jutaan warga di Pulau Jawa tidak menyadari tinggal di atas patahan aktif. Selain di sesar Lembang, Jawa Barat, keberadaan sesar aktif yang membelah kota-kota besar di Jawa ini belum terpetakan secara detail. Di Semarang, Jawa Tengah, jalur sesar ini diketahui melalui kawasan perumahan.

"Studi untuk mendetailkan jalur sesar di Semarang sudah kami lakukan beberapa tahun terakhir dan masih berlanjut. Peta detailnya belum bisa kami rilis, tetapi secara umum lokasi patahannya di sekitar Gunung Kebo," kata peneliti gempa bumi Universitas Gadjah Mada (UGM), Gayatri Indah Marliya-

ni, Rabu (9/1/2019).

Saat ini, penelitian tersebut, menurut Gayatri, terkendala karena sekitar jalur sesar ini sudah jadi perumahan. "Banyak yang sudah tertutup *conblock* dan bangunan. Sebagai peneliti, kami merasa dilemma juga. Satu sisi ini kajiannya masih jalan, di sisi lain kami yakin kawasan ini membahayakan untuk hunian," tuturnya.

Menurut Gayatri, berbagai kajian sebelumnya yang telah terbit di jurnal ilmiah telah memastikan keaktifan jalur di Jawa, termasuk di sekitar Jawa Tengah. Selain kajian terbaru oleh Endra Gunawan (2019), dalam kajian A Koulali (2016) disebutkan, di utara Jawa Te-

ngah terdapat sesar Kendeng yang menerus hingga dekat Surabaya sebelum masuk ke Selat Madura. Sementara di Jawa Barat terdapat sesar Baribis dan sesar Lembang, serta belakangan adanya sesar Jakarta.

"Sesar Kendeng memang aktif di Jawa Tengah, tetapi menurut pendapat saya jalur ini terbagi dalam beberapa blok atau segmen lebih kecil. Kalau sepanjang dugaan Koulali, gempanya akan besar sekali," katanya. Selain sesar Kendeng, juga ada sesar lain yang lebih kecil, seperti sesar Semarang, sesar Ambarawa, dan sesar Lasem. Sesar-sesar ini siklus keberulangannya belum diketahui dengan pasti.

"Sesar Semarang ini ada di ujung barat sesar Kendeng. Jika sesar Kendeng arahnya barat-timur, sesar Semarang ini barat laut-tenggara," kata Gayatri. Meski demikian, menurut dia, masih butuh studi lanjutan, termasuk uji paritan, untuk bisa mendetailkannya seperti jalur sesar Lembang, termasuk siklus perulangan dan kekuatan maksimal gempanya.

Untuk Jawa, jalur sesar yang sudah dipetakan sangat baik baru sesar Lembang, yang dilakukan oleh peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mudrik R Daryono dan tim, yang kajiannya baru-baru ini dipublikasikan di jurnal inter-

nasional. Mudrik menyebutkan, berdasarkan peta berbasis LiDAR dengan resolusi 90 sentimeter, jalur patahan Lembang dipastikan melalui permukiman warga, bangunan sekolah, puskesmas, dan instansi militer. Tak hanya berdampak di sekitar jalur patahan, gempa yang terjadi juga bisa berdampak hingga Kota Bandung.

Penelitian yang dilakukan Ayu Retnowati, Irwan Meilano, Akhmad Riqqi, dan Rahma Hanifa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2017 menemukan, potensi kerugian ekonomi jika terjadi gempa di sesar Lembang bisa mencapai

(Bersambung ke hlm 11 kol 3-5)

Sesar Lembang



Seismisitas Terbaru Sesar Lembang

-  22 Juli dan 28 Agustus 2011
-  Kejadian gempa kecil (magnitudo kurang dari 3)

Sumber: Penelitian Earthquake Geology of the Lembang Fault, West Java, Indonesia (Mudrik R Daryono, Danny Natawidjaja, Benjamin Sapie, Phil Cummins, 2018)



INFOGRAFIK: LUHUR

Patahan Melewati Perumahan dan Sekolah

(Sambungan dari halaman 1)

Rp 51 triliun. Nilai ini hanya dari nilai kerusakan bangunan permukiman.

Berdasarkan perhitungan tim ini, ada sekitar 2,5 juta rumah warga yang berpotensi terdampak gempa dari patahan yang memanjang 29 kilometer arah timur-barat di utara Bandung tersebut. Rumah yang berpotensi rusak ringan 1 juta unit, rusak total 500.000 rumah, dan selebihnya atau 1 juta rumah rusak sedang. "Saat ini, kami tengah hitung lagi lebih detail dengan data terbaru, bekerja sama dengan Bappenas dan BNPB," kata Rahma.

Sejarah gempa

Secara kasatmata, jalur sesar aktif ini ditandai oleh topografi sungai, keberadaan endapan sungai di puncak bukit, keberada-

an titik lemah yang terus memicu longsoran, serta sebaran gempa yang terekam. "Di Semarang, titik lemah ini cukup banyak dan setelah diperiksa memang memiliki kelurusan dengan jalur sesar aktif," kata Gayatri.

Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono mengatakan, gempa bumi tercatat pernah terjadi berulang kali di Semarang, yaitu pada 1856, 1958, 1959, dan 1966.

Gempa lain di Jawa tengah di antaranya di Ambarawa pada 1865, Pati pada 1890, Lasem pada 1847, dan Kudus pada 1877. Gempa yang merusak juga pernah terjadi di Wonosobo tahun 1924. Terbaru, gempa terekam di dekat Kota Salatiga pada 15 Januari 2017. Sekalipun keku-

atannya hanya M 2,6, ini menandai aktifnya zona kegempaan di kawasan ini.

Gayatri mengingatkan, selain bahaya kerusakan bangunan di sepanjang jalur patahan aktif, bahaya jika terjadi gempa tektonik adalah amplifikasinya. Untuk bangunan yang dilalui jalur sesar aktif seharusnya memang dikosongkan, minimal 15 meter di kanan-kirinya. Selain itu, bangunan juga harus sudah menerapkan standar konstruksi tahan gempa.

Belajar dari kasus di Palu, fenomena likuefaksi menjadi ancaman bagi kota-kota di Indonesia, yang dibangun di atas endapan pasir. "Kota Semarang dan Jakarta memiliki karakteristik hampir sama. Tanahnya terdiri dari lapisan pasir tebal yang halus, yang rentan likuefaksi jika terjadi gempa," tuturnya. (AIK)

Judul	IKCI 2018: Penghargaan Terhadap 12 Kota Cerdas	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 1)		
Resume	Sebanyak 12 kota menerima penghargaan Indeks Kota Cerdas Indonesia 2018 yang diberikan Kompas, Rabu (9/1). Penghargaan diberikan kepada kota yang menerapkan konsep kota cerdas berdasarkan penilaian dan pembobotan enam dimensi yang dikembangkan Boyd Cohen, Pegiat Kota Cerdas Internasional. Keenam dimensi itu mencakup lingkungan cerdas, mobilitas, pemerintahan, ekonomi, masyarakat, dan kualitas hidup. dimensi masyarakat dengan indikator keterhubungan internet, penetrasi telepon seluler, partisipasi warga, tingkat pendidikan, imigrasi, dan pekerjaan industry kreatif memperoleh pembobotan skor paling tinggi. 12 kota dengan skor tertinggi terbagi dalam 4 kategori, yaitu: Kota Metropolitan (Peringkat 1-3): Surabaya, Semarang, Tangerang Selatan. Kota Besar (Denpasar, Surakarta, Malang), Kota Sedang: Manado, Salatiga, Yogyakarta. dan Kota Kecil (Padang Panjang, Sungai Penuh, Solok).		

IKCI 2018

Penghargaan bagi 12 Kota Cerdas

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 12 kota menerima penghargaan Indeks Kota Cerdas Indonesia 2018 yang diberikan Kompas, Rabu (9/1/2019). Penghargaan diberikan kepada kota yang berupaya menerapkan konsep kota cerdas berdasarkan penilaian dan pembobotan enam dimensi yang dikembangkan Boyd Cohen, pegiat kota cerdas internasional.

Keenam dimensi itu mencakup lingkungan cerdas, mobilitas, pemerintahan, ekonomi, masyarakat, dan kualitas hidup. Dimensi masyarakat dengan indikator keterhubungan internet, penetrasi telepon seluler, partisipasi warga, tingkat pendidikan, imigrasi, dan pekerjaan industri kreatif memperoleh pembobotan skor paling tinggi.

Penilaian berdasarkan dimensi dan pembobotan nilai, yang melibatkan penilaian 12 pakar, menghasilkan 12 kota dengan skor tertinggi yang terbagi dalam empat kategori: Kota Metropolitan (peringkat 1-3 berurutan Surabaya, Semarang, Tangerang Selatan), Kota Besar (Denpasar, Surakarta, Malang), Kota Sedang (Manado, Salatiga, Yogyakarta), dan Kota Kecil (Padang Panjang, Sungai Penuh, Solok). Lima kota di DKI Jakarta tidak ikut dinilai karena tidak memiliki DPRD kota dan tanpa APBD.

"Secara sosiologis, yang cerdas sebenarnya adalah warganya. Memang ada internet, aplikasi, dan platform, tetapi rohnyanya adalah rasa kebersamaan," kata Daisy Indira Yasmin, sosiolog dari Universitas Indonesia, salah satu juri Indeks Kota Cerdas

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-5)

Penghargaan bagi 12 Kota Cerdas

(Sambungan dari halaman 1)

Indonesia (IKCI) 2018, dalam diskusi sesuai penganugerahan IKCI 2018 di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Hadir dalam acara itu semua wali kota pemenang atau yang mewakili.

Secara teknis, penilaian juri didasarkan data yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik dan sejumlah lembaga lain. Total dinilai 93 kota otonom yang dibagi dalam empat kategori sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Skor penilaian dalam IKCI 2018 totalnya 100. Pembagiannya 0-90 untuk penilaian dimensi dan bobot, sedangkan 0-10 untuk penilaian pakar.

Sasaran pada warga

Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah Institut Teknologi Bandung Ridwan

Sutriadi, yang juga juri IKCI 2018, mengatakan, dalam 50 tahun terakhir, urbanisasi di Indonesia tumbuh pesat. Yang perlu diantisipasi, investasi tidak hanya datang di kota kategori metropolitan (berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa), tetapi juga menengah (mulai lebih dari 100.000 jiwa hingga 500.000 jiwa) dan kecil (kurang dari 100.000 jiwa).

Investasi masuk itu perlu diikuti pengelolaan cerdas dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan warganya.

Hal sama disampaikan Pemimpin Redaksi Kompas Ninuk Mardiana Pambudy bahwa kota akan jadi tujuan terakhir dalam pergerakan manusia. Saat ini, sekitar 50 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.

"Perkembangan yang secara alamiah terjadi itu harus disertai pengelolaan kota yang mumpuni bagi warga," ujarnya. Sejak awal didirikan, Kompas memberi tempat bagi upaya atau

inovasi yang bertujuan mewujudkan hidup manusia yang lebih baik secara berkelanjutan.

Tanggapan kota

Wali Kota Manado Vicky Lummentut mengatakan, penghargaan kota cerdas yang mereka terima ini sesuai visi kota "Manado Cerdas" yang mengarah pada warga lebih terlayani dan sejahtera melalui sejumlah program, termasuk Cerdas Command Center (C3). Manado menduduki peringkat pertama kategori kota sedang. Ada 57 kota dalam kategori sama.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, meski penghargaan serupa didapatkan melalui berbagai ajang itu bukan tujuan pemerintahannya. "Bagi kami, tujuan pemerintahan adalah membuat masyarakat sejahtera," ucapnya.

Hal sama dikatakan Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran bahwa implementasi konsep kota cerdas dimulai dengan

Indeks Kota Cerdas Indonesia 2018

Dimensi Penilaian (bobot dalam persen)

6 dimensi yang terbagi menjadi 18 sub dimensi, 36 indikator dari 71 sub indikator



Keterangan: Lingkup penilaian berdasarkan model yang dipakai dalam IKCI 2018, yakni Lingkungan Kota Cerdas oleh Boyd Cohen

Pemenang IKCI 2018

Kota Metropolitan	Skor	Kota Sedang	Skor
• Surabaya	87,03	• Manado	59,04
• Semarang	63,89	• Salatiga	58,99
• Tangerang Selatan	61,68	• Yogyakarta	58,96
Kota Besar	Skor	Kota Kecil	Skor
• Denpasar	61,70	• Padang Panjang	55,14
• Surakarta	61,03	• Sungai Penuh	55,02
• Malang	60,21	• Solok	51,64

Keterangan: Skor Indeks Kota Cerdas berada di antara angka 1 dan 100. Semakin besar angka menunjukkan kian mendekati kondisi ideal kota cerdas.

Sumber: LIU/Utang Kompas

INFOGRAFIK: DIMAS

membangun manusia, di antaranya melalui pendidikan berkualitas. Kualitas manusia merupakan faktor utama pembangunan kota.

Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra

mengatakan, dengan melibatkan komunitas, konsep kota cerdas yang dibentuk terus ada meski pemerintahan berganti. Salah satu prioritas adalah pengembangan ekonomi kreatif.

(NDY/NIA/BOW/TAN/E07)

Judul	Mitigasi Kunci Penanganan Bencana	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 10)		
Resume	Mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi kunci penanggulangan bencana di Indonesia yang terus terjadi. Hal itu menjadi tugas berat ke depan bagi pemimpin baru BNPB.		

Mitigasi, Kunci Penanganan Bencana

Mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi kunci penanggulangan bencana di Indonesia yang terus terjadi. Hal itu menjadi tugas berat ke depan bagi pemimpin baru Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Rangkaian bencana alam yang melanda sepanjang tahun 2018 menewaskan 8.949 orang, 1.482 hilang, 21.064 terluka, 10,2 juta orang terdampak, 319.527 rumah rusak, dan kerugian ekonomi puluhan triliun rupiah. Angka itu diperkirakan bertambah pada tahun-tahun mendatang jika kita gagal mengurangi risiko bencana.

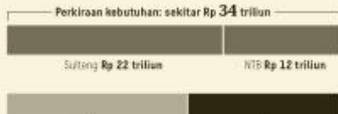
Terkait hal itu, sesuai mandat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo di Istana Negara Jakarta, Rabu (9/1/2019), Presiden Joko Widodo menugaskan manajemen mitigasi dan penanggulangan bencana. Hal itu diawali revisi payung hukum BNPB diikuti penggantian pimpinan badan itu.

"Kita harus sadar negara ini ada di (daerah) cincin api sehingga perlu manajemen dan kepemimpinan kuat untuk melaksanakan koordinasi serta koordinasi pemerintah daerah, provinsi, pusat, TNI, dan Polri agar cepat merespons bencana," kata Presiden.

Doni menyatakan, BNPB beserta lembaga terkait akan menyiapkan program mitigasi tentang *myantrist* di Indonesia. "Dari hasil riset sejumlah pakar kebencanaan, ada potensi *myantrist* (subduksi besar) di beberapa wilayah. Ini harus kita sampaikan kepada publik dengan cara tepat agar semua kawasan rawan bencana menyadari diri," kata Doni.

Terkait prioritas jangka pendek, BNPB akan menyelesaikan pekerjaan di sejumlah daerah yang terkena bencana, yakni Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Banten, Lampung, dan Sukabumi. BNPB akan menyusun program perluasan dan peningkatan mitigasi, termasuk memajukan kesadaran hidup di

Rencana Pendanaan Pemulihan Pascabencana Sulteng dan NTB



Pendanaan yang tersedia Rp 18,392 triliun terdiri dari:

Dalam negeri: Rp 6 triliun

- Bantuan non-KA: Rp 5 triliun
- Pooling fund: Rp 1 triliun

Luar negeri: 818,2 juta dolar AS (sekitar Rp 12,392 triliun)

- Hibah: 18,2 juta dolar AS dan 7 juta euro
- Realokasi proyek on going: 300 juta dolar AS
- Pinjaman baru (budget support): 500 juta dolar AS

Perlu arahan terkait penastabilan program LN

- Budget support: 150 juta dolar AS (Rp 2,25 triliun)
- Iwanan pinjaman proyek: 1 miliar dolar AS (Rp 15 triliun)
- Lewatan hibah China, Belanda Baru, UN Agencies, dan donor lainnya

*Extrisa awal
1 dolar AS: Rp 15.000, 1 euro: Rp 17.000

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

area rawan bencana dalam kurikulum pendidikan menengah pendidikan anak usia dini.

Beban negara

Sejauh ini, bencana alam beruntun yang melanda negeri ini menjadi beban besar negara. "Untuk memulihkan bencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah saja, kita butuh Rp 34 triliun," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, kemarin.

Sebagian besar kebutuhan dana itu ditopang dari utang luar negeri. Anggaran dalam negeri tersedia hanya Rp 6 triliun dan komitmen luar negeri

Rp 15,6 triliun. Ada kekurangan dana Rp 15,6 triliun.

Hal itu belum dinilai dengan jatuhnya korban jiwa yang menurut BNPB angkanya naik 984 persen pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2017, ada 309 korban jiwa meski jumlah bencana lebih banyak 10 persen daripada 2018. Besarnya jumlah korban jiwa terutama disumbangkan bencana geologi berupa gempa, tsunami, dan likuefaksi.

Meski frekuensinya 3,2 persen dari total bencana di Indonesia, bencana geologi paling mematikan. Rentetan gempa di Lombok menewaskan 564 orang. Gempa, likue-

Tren Bencana Indonesia 2009-2018



Prediksi Bencana Hidrometeorologi 2019

- Diprediksi kejadian bencana selama 2019 lebih dari 2.500 kejadian bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
- Diprediksi bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan puting beliung, masih akan mendominasi bencana selama 2019. Diperkirakan lebih dari 95 persen akibat bencana hidrometeorologi.
- Banjir dan longsor masih akan banyak terjadi di daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor sesuai dengan peta rawan banjir dan longsor.
- Kebijakan fuzon dan lahan masih akan terjadi, tetapi dapat ditasi dengan lebih baik.

Prediksi Bencana Geologi 2019

- Diprediksi gempa akan terjadi selama 2019. Rata-rata setiap bulan ada sekitar 500 kejadian gempa di Indonesia.
- Diprediksi gempa terjadi di Jawa subdilat di luar dan Jawa besar di barat.

INFOGRAFI LIPUT



Presiden Joko Widodo melantik Letjen Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara Jakarta, Rabu (9/1/2019). Mantan Danjen Kopassus dan Komandan Pasopang di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014 itu menggantikan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangile.

faksi, dan tsunami di Sulawesi Tengah menyebabkan 3.475 orang tewas dan hilang. Tsunami di Selat Sunda menewaskan 437 orang. Padahal, tiga bencana geologi itu belum pada kekuatan puncak.

Dampak kebancuran bisa lebih katastrofik lagi jika terjadi di pusat kepadatan negeri ini, seperti temuan para ilmuwan soal aktifitas jalur-jalur patahan di Jawa, melewati kota-kota besar, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Peringatan Njoo Nguyen, Phil B Cummins, dan Tim dari Australian National University tahun 2015, gempa besar di Jawa bisa berdampak amat besar.

Bentang alam negeri ini menyimpan jejak bencana katastrofik. Misalnya, letusan Gunung Krakatau pada 1883 diikuti tsunami menewaskan lebih dari 36.000 jiwa. Letusan Gunung Toba di Sumatera Utara menjadi letusan gunung terbesar di Bumi 2 juta tahun terakhir dan hampir memusnahkan manusia modern. Baru 14 tahun lalu, kita mengalami gempa dan tsunami yang mengakibatkan 200.000 jiwa penduduk Aceh meninggal atau hilang.

Kita juga menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Ancaman paling nyata adalah banjir, longsor, dan pu-

ting beliung. Namun, arah pembangunan mengingkari risiko bencana karena mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Orientasi pembangunan jangka pendek kerap membuat daerah menutupi risiko bencana, seperti di Sulawesi Tengah sebagaimana dilakukan Direktur Perkumpulan Skala yang memimpin Ekspedisi Palu-Koro Trinitrimalanganrum.

Pengabaian risiko bencana juga membahayakan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana, BNPB punya fungsi strategis melaksanakan koordinasi dan mengomando penanggulangan

bencana di Indonesia. Undang-undang itu juga memantapkan penanggulangan bencana melibatkan perencanaan pembangunan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Namun, pelaksanaan fungsi koordinasi, pencegahan, dan mitigasi bencana belum optimal dan jadi tugas berat pimpinan baru BNPB. "Penanggulangan bencana tidak hanya tanggap darurat dan pemulih-

an," kata Eko Teguh Paripurno dari akademisi yang juga tokoh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. (AIK/LAS/NTA)

Judul	Mengatasi Problem Akses	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 14)		
Resume	Pariwisata menjadi sector yang diharapkan menyumbang devisa dalam waktu singkat dan jumlah besar. Namun pengembangannya menghadapi kendala, antara lain terkait akses. Walaupun sudah beberapa kali menyabet penghargaan terbaik di ajang internasional, pariwisata Indonesia belum jadi yang pertama. Di ASEAN saja Indonesia kalah dari Thailand untuk jumlah kunjungan turis asing, dan kalah dari Malaysia untuk wisata halal. Padahal potensi dan budayanya lebih unggul. Indonesia kaya akan semua yang bisa dijual untuk pariwisata. Namun aksesibilitas masih menjadi kendala baik bagi wisatawan mancanegara maupun local meski pemerintah gencar membangun infrastruktur beberapa tahun terakhir. Kementerian PUPR dan Kemenhub misalnya, mengerahkan anggaran untuk membangun akses ke lokasi pariwisata. Sementara Kementerian ESDM menyediakan infrastruktur kelistrikan.		

Mengatasi Problem Akses

Pariwisata menjadi sektor yang diharapkan menyumbang devisa dalam waktu singkat dan jumlah besar. Namun, pengembangannya menghadapi kendala, antara lain terkait akses.

Walaupun sudah beberapa kali menyabet penghargaan terbaik di ajang internasional, pariwisata Indonesia belum jadi yang pertama. Di ASEAN saja, Indonesia kalah dari Thailand untuk jumlah kunjungan turis asing dan kalah dari Malaysia untuk wisata halal. Padahal, potensi alam dan budayanya lebih unggul.

Indonesia kaya akan semua yang bisa dijual untuk pariwisata. Namun, aksesibilitas masih jadi kendala, baik bagi wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan lokal meski pemerintah gencar membangun infrastruktur beberapa tahun terakhir.

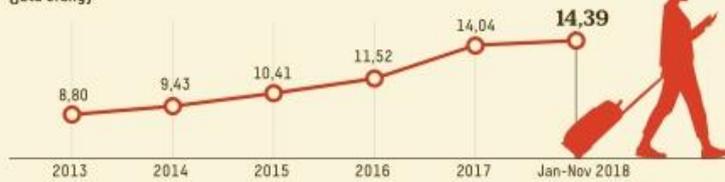
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan, misalnya, mengerahkan anggaran untuk membangun akses ke lokasi pariwisata. Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyediakan infrastruktur kelistrikan.

Perhatian itu terutama ke 10 destinasi wisata prioritas, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu dan Kota Tua (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku).

Wisman bisa masuk ke Indonesia melalui tiga pintu utama, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Banten, I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan Hang Nadim di Batam. Beberapa bandara juga bisa jadi akses walaupun sifatnya bilateral, seperti Husein Sastranegara di Bandung, Sam Ratulangi di Manado, Zainuddin Abdul Majid di Lombok, dan Adi Sumarmo di Solo.

Bandara dan pelabuhan lain juga dibangun di daerah agar semakin mudah diakses dan

Tren Kunjungan Wisatawan Mancanegara
(juta orang)



Sumber: Litbang Kompas/STA, DeLah dari data Kementerian Pariwisata, BPS, dan laman asean.org

INFOGRAPHIC: NINGSUAWATI

saling terhubung. Namun, semua yang dibangun itu belum cukup menarik lebih banyak wisman.

Tahun lalu, target kunjungan diyakini tidak tercapai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisman selama kurun Januari-November 2018 baru 14,39 juta orang. Meski naik 11,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017, capaian itu masih jauh dari target pemerintah, yakni 17 juta orang.

Kementerian Pariwisata menyatakan, rangkaian bencana alam sejak pertengahan tahun 2018 membuat target itu tak tercapai. Gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Agustus 2018, dinilai sangat berdampak, terutama di Bali yang posisinya relatif berdekatan.

Beruntung ada beberapa ajang akbar di tahun 2018, yakni Asian Games, Asian Para Games, serta Pertemuan Tahunan Bank Dunia-Dana Moneter In-

ternasional. Acara-acara itu dianggap mendorong jumlah kunjungan wisman. Namun, sumbangannya belum mampu menutup target jumlah kunjungan wisman tahun lalu.

Doorong efisiensi

Ke depan, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisman, misalnya dengan mempercepat pembangunan *low cost carrier terminal* (LCCT) di pintu-pintu utama. Terminal ini tak sekadar menjadi tempat naik-turunnya penumpang pesawat berbiaya murah, tetapi juga memberikan layanan yang lebih efisien sehingga menekan ongkos.

Penerapannya, antara lain, dengan tidak lagi menggunakan tenaga manusia di pusat pelaporan. Penumpang cukup melapor melalui mesin, lalu melepaskan bagasi di tempatnya. Dengan demikian, retribusi yang dikenakan kepada penumpang lebih murah. Demikian

pula dengan harga tiket pesawat.

Jepang dianggap telah membuktikannya. Dengan membangun LCCT dan memperbanyak penerbangan berbiaya murah, jumlah kunjungan wisman ke negaranya terus bertambah. Hanya dalam dua tahun, Jepang bisa meningkatkan kunjungan wisman hingga dua kali lipat. Wisata ke Jepang yang selama ini dicitrakan mahal ternyata bisa dijangkau wisman. Dengan budaya, alam, dan segenap potensi yang dimilikinya, Jepang bisa mendorong sektor pariwisatanya dengan cepat.

Kini PT Angkasa Pura II (Persero) sedang menyiapkan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai LCCT. Namun, upaya itu belum selesai. Jika bisa dioperasikan tahun ini, keberadaannya diyakini bakal menarik maskapai penerbangan berbiaya murah dari negara-negara lain datang ke Indonesia, seperti dari China

dan India yang memang potensi turisnya sangat tinggi.

Selain mempermudah dan memperbanyak akses masuk ke Indonesia, pemerintah perlu membangun akses ke lokasi-lokasi tujuan wisata agar lebih murah dan mudah. Badan usaha milik negara dan swasta pun bisa terlibat di dalamnya.

Upaya yang ditempuh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, melalui PT ASDP Indonesia Ferry, misalnya, menyediakan kapal-kapal yang menghubungkan tempat-tempat wisata seperti Kepulauan Seribu, Raja Ampat, dan baru-baru ini di Labuan Bajo. Dengan adanya kapal ASDP, para turis mendapatkan pilihan transportasi. Jika sebelumnya hanya mengandalkan kapal rakyat, mereka kini bisa menggunakan layanan kapal yang lebih besar dan standar pelayanan yang lebih baik.

Standar di transportasi memang berperan sangat penting. Namun, hal ini sering diabaikan pelaku jasa di sektor ini. Kapal rakyat yang melayani pelayaran ke lokasi wisata, misalnya, sering didapati mengangkut penumpang dalam jumlah yang melebihi kapasitas. Terkadang pengelola kapal tidak menyediakan perlengkapan keselamatan, seperti jaket pelampung. Kalau ada, jumlahnya tak sesuai dengan jumlah penumpang. Jika tidak standar, turis kadang tidak mau naik kapal karena tidak ada jaminan keselamatan.

Aksesibilitas ternyata tidak bisa dianggap sepele. Tahun 2015, pemerintah telah membuka akses dengan memberikan visa bebas kunjungan kepada 169 negara. Seperti keran air, semakin besar dibuka, semakin banyak air yang mengalir. Namun, jika pipanya tidak tersedia atau mampat, airnya tidak bisa mengalir.

Jadi, persoalan akses harus dipecahkan secara komprehensif agar devisa dari pariwisata semakin besar.

(M CLARA WRESTI)

Judul	Dibuka Opsi Relokasi Mandiri Bagi Warga	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 16)		
Resume	Penyintas boleh membangun rumah di lahan pribadi. Biaya yang diberikan sama dengan pembangunan rumah di lahan relokasi pemerintah. Relokasi pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di Kota Palu bisa dilakukan di lahan pribadi atau relokasi mandiri. Hal itu untuk menjaga ikatan penyintas bencana dengan lingkungan sosial. “ Yang terpenting lahan yang akan dibangun bukan termasuk zona merah atau zona terlarang” Kata Kepala Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.		

Dibuka Opsi Relokasi Mandiri bagi Warga

Penyintas boleh membangun rumah di lahan pribadi. Biaya yang diberikan sama dengan pembangunan rumah di lahan relokasi pemerintah.

PALU, KOMPAS — Relokasi dan pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah, bisa dilakukan di lahan pribadi atau relokasi mandiri. Hal itu untuk menjaga ikatan penyintas dengan lingkungan sosial.

“Yang terpenting lahan tersebut tak masuk dalam zona merah atau zona terlarang,” kata Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu Ibnu Mundzir di sela-sela dialog publik penyusunan rencana aksi daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu, Rabu (9/1/2019). Dialog publik difasilitasi Program Pembangunan PBB (UNDP). Rencana aksi daerah ditargetkan rampung akhir Januari.

Gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Kerusakan masif terjadi

di Palu. Total rumah rusak berat, sedang, ringan, dan hilang sebanyak 42.816 unit.

Untuk penyintas yang rumahnya dilanda likuefaksi dan tsunami, pemerintah menyiapkan lahan untuk relokasi. Di Kota Palu, pemerintah menyiapkan dua titik relokasi, yakni Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, dan Kelurahan Tondo-Talise, Kecamatan Mantikulore.

Ibnu menyatakan, pertimbangan relokasi bisa di lahan pribadi atau keluarga penyintas demi menjaga hubungan kekerabatan. Biaya pembangunan rumah yang relokasi di lahan pribadi sama dengan biaya pembangunan rumah di lahan relokasi pemerintah.

Dekat keluarga besar

Ariudin (33), penyintas di kompleks hunian sementara Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Palu, mengatakan, dia

memiliki lahan untuk membangun rumah. Lahan itu cukup jauh dari Teluk Palu, lokasi rumah lamanya yang hancur diterjang tsunami.

“Kalau ada kemungkinan membangun rumah di lahan sendiri, lebih baik. Saya bisa dekat keluarga,” katanya.

Menurut Mambaus Suud dari UNDP, selama tidak menabrak aturan, aspirasi masyarakat harus selalu menjadi pertimbangan utama.

Ia memaparkan, survei UNDP pada Desember 2018 dengan 1.005 responden (kepala keluarga) terungkap empat aspirasi warga terkait relokasi, yakni di daerah aman (47,10 persen), dekat rumah lama (17,32 persen), dekat sumber penghasilan (12,93 persen), dan disediakan pemerintah (17,87 persen).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palu Presly Tampubolon

mengatakan, total kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai Rp 6,28 triliun.

Rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan selesai dalam dua tahun. Namun, APBD Kota Palu hanya Rp 1 triliun per tahun, sedangkan proyeksi kebutuhan Rp 4 triliun. Target itu bakal meleset. Pihaknya menjajaki kemungkinan pembiayaan dari lembaga donor.

Sementara itu, pemerintah berkomitmen mempercepat proses rekonstruksi pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Rehabilitasi rumah rusak dan pembangunan hunian sementara menjadi fokus.

Upaya percepatan penanganan dampak bencana kembali dibahas dalam rapat para menteri dan pejabat terkait yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Rabu.

(VDL/NTA/LAS)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 16)		
Resume	Peresmian Dermaga TNI Angkatan Laut, Tawiri, Ambon, Maluku pada Rabu (9/1).		



KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX Laksamana Pertama Antongan Simatupang, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Ismail Usemahu (kiri ke kanan) dalam peresmian dermaga TNI Angkatan Laut di Desa Tawiri, Kota Ambon, Maluku, Rabu (9/1/2019).

Judul	Infrastruktur : Bendungan Logung Dioptimalkan	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 17)		
Resume	Bendungan logung di Kudus Jawa Tengah dilengkapi sistem pemantauan termutakhir yang akan menyediakan informasi kondisi volume tampungan. Sistem yang juga diterapkan pada 17 bendungan lain nya di Jateng tersebut bakal mengoptimalkan fungsi infrastruktur bendungan. BEndungan logung saat ini sedang tahap pengisian setelah pengisian awal dilaksanakan pada 18 Desember 2018. Sebelum beroperasi penuh, bendungan dengan daya tampung 20.15 juta meter kubik itu melewati proses sertifikasi dahulu. Kepala BBWS Pemali Juana, Rubhan Ruzziatno mengatakan sistem pemantauan itu merupakan program Ditjen SDA Kementerian PUPR. Dari situ data pemantauan semua bendungan bakal terkoneksi ke Pusat Bendungan.		



KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Petugas mengamati Bendungan Logung di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu (9/1/2019). Pengisian awal waduk dilakukan pada 18 Desember 2018 dan diharapkan elevasi muka air sampai ke tempat pengambilan air sungai (*intake*) pada akhir Januari 2019. Kapasitas tampungan Bendungan Logung adalah 20,15 juta meter kubik.

INFRASTRUKTUR

Bendungan Logung Dioptimalkan

KUDUS, KOMPAS — Bendungan Logung di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dilengkapi sistem pemantauan termutakhir yang akan menyediakan informasi kondisi volume tampungan. Sistem yang juga diterapkan pada 17 bendungan lainnya di Jateng tersebut bakal mengoptimalkan fungsi infrastruktur bendungan.

Bendungan Logung saat ini sedang tahap pengisian setelah pengisian awal dilakukan 18 Desember 2018. Sebelum beroperasi penuh, bendungan dengan daya tampung 20,15 juta meter kubik itu terlebih dulu melewati proses sertifikasi.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Rubhan Ruzziyatno, Rabu (9/1/2019), mengatakan, sistem pemantauan itu merupakan program Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari situ, data pemantauan semua bendungan bakal terko-

Untuk irigasi, lahan pertanian yang teraliri 5.300 hektar.

Rubhan Ruzziyatno

neksi ke Pusat Bendungan. Sistem itu juga terpasang di 17 bendungan di Jateng, di antaranya Jatibarang, Kedungombo, Gunung Rowo, Cacaban, Penjalin, dan Tempuran.

"Dengan informasi itu akan diketahui kapan dan seberapa banyak diperlukan penambahan atau pengurangan (volume), baik untuk kebutuhan irigasi, air baku, maupun pembangkit listrik," ujar Rubhan.

Rencana pemanfaatan Bendungan Logung, antara lain untuk pengendali banjir, irigasi, suplai air baku, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro 0,5 megawatt.

"Untuk irigasi, lahan pertanian yang teraliri 5.300 hektar,"

kata Rubhan.

Pantauan BBWS Pemali Juana menunjukkan elevasi muka air telah mencapai 64 meter. Adapun elevasi puncak adalah 88,5 meter.

Luas Bendungan Logung 196 hektar. Bendungan itu memiliki kedalaman hingga 55 meter. Aliran air dari hulu berasal dari mata air Gunung Muria melalui dua sungai, yakni Sungai Logung dan Sungai Gajah.

Subur (48), warga Desa Jojo, Kecamatan Mejobo, Kudus, antusias jelang pengoperasian Bendungan Logung. "Hampir setiap tahun, saat hujan deras, air Sungai Logung kerap meluap dan menyebabkan banjir hingga 40 cm. Dengan adanya bendungan, masalah itu kami harap teratasi," katanya.

Subur, yang juga petani, menambahkan, setiap musim kemarau, saluran irigasi selalu kering. Adanya aliran dari Bendungan Logung nantinya diharapkan akan membantu petani. (DIT)

Judul	Jalan Tol: Japek Selatan Segera Dibangun	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	PT Jasamarga Japek Selatan segera memulai pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan seiring dengan akan diumumkannya kontraktor proyek tersebut dalam waktu dekat. Direktur Keuangan dan Administrasi PT Jasamarga Japek Selatan, I.B.K Yudharta mengatakan bahwa Penentuan kontraktor Japek II selatan tinggal menunggu hasil pengumuman lelang kontraktor. Beberapa waktu lalu, Yudharta mengatakan bahwa perusahaan sudah merilis pengumuman lelang di Media massa dan laman perseroan terkait dengan lelang kontraktor proyek ini.		

► JALAN TOL

Japek Selatan Segera Dibangun

JAKARTA — PT Jasamarga Japek Selatan segera memulai pembangunan jalan tol Jakarta—Cikampek II Selatan seiring dengan akan diumumkannya kontraktor proyek tersebut dalam waktu dekat.

Arifia P. Kinanti
arifa.ju@oia.com

Direktur Keuangan & Administrasi PT Jasamarga Japek Selatan I.B.K Yudharta mengatakan bahwa penentuan kontraktor pembangunan proyek jalan tol Japek II Selatan tinggal menunggu hasil pengumuman lelang kontraktor.

"Kontraktornya belum diumumkan dan belum ditetapkan, tetapi sudah tinggal pengumuman saja. Mungkin tidak lama lagi," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (8/1).

Beberapa waktu lalu, Yudharta mengatakan bahwa perusahaan sudah merilis pengumuman lelang di media massa dan laman perseroan terkait dengan lelang kontraktor proyek jalan tol Japek Selatan.

Dilansir dari informasi lelang, pendaftaran dibuka pada 27 Agustus—29 Agustus 2018.

Dalam informasi lelang, hanya perusahaan konstruksi dengan kontrak pembangunan jalan tol minimal Rp1 triliun yang akan dilirik PT Jasamarga Japek Selatan.

Selain itu, calon peserta lelang juga diharuskan memiliki kemampuan pendanaan minimal Rp3 triliun.

Dengan kata lain, kontraktor yang memenangkan lelang ini akan mendanai konstruksi jalan tol Jakarta—Cikampek Selatan terlebih dahulu. Skema ini juga diterapkan pada proyek Jakarta—Cikampek II Elevated yang konsesinya juga dimiliki PT Jasa Marga Tbk. (JSMR).

Berdasarkan data yang dilansir Badan Pengusahaan Jalan Tol, per

► Kredit sindikasi Japek Selatan dikucurkan tiga bank dan tiap-tiap bank memberi kredit sekitar Rp1,38 triliun.

► Jalan tol Japek Elevated ditargetkan dapat digunakan fungsional pada masa Lebaran nanti.

Agustus 2018, JSMR memiliki 80% saham di PT Jasamarga Japek Selatan, sisanya dikuasai oleh PT Wira Nusantara Bumi.

Ketika itu, Yudharta mengemukakan bahwa pengumuman pemenang lelang diperkirakan dilaksanakan pada Oktober 2018 sehingga tahap konstruksi bisa dimulai pada Desember 2018.

Akan tetapi, hingga kemarin, Bisnis belum mendapat jawaban lebih lanjut dari Yudharta nama-nama peserta lelang konstruksi jalan tol Japek Selatan.

Pembangunan jalan tol Jakarta—Cikampek (Japek) II Selatan terdiri atas tiga paket sepanjang lebih kurang 62 kilometer dari Jati Asih menuju Sadang. Perinciannya, paket 1 (00+00—Sta 9+300) sepanjang 9,30 km; paket 2 (Sta 9+300—Sta 34+150) sepanjang 24,85 km; dan Paket 3 (Sta 34+150—Sta 62+00) sepanjang 27,85 km.

Adapun, menurut Yudharta, tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh perusahaan akan dimulai dari paket 3 mengingat kondisi lahan yang bukan perumahan sehingga proses pengalihan tanah dapat lebih cepat.

Proyek jalan tol Japek Selatan membentang dari Jati Asih hingga Sadang. Pembangunannya dibagi menjadi enam seksi, yakni Jati-asih—Bantar Gebang, Bantar Gebang—Setu, Setu—Sukaragam, Sukaragam—Taman Mekar, Taman Mekar—Kuta Negara, dan Kuta Negara—Sadang.

Berdasarkan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang sudah ditandatangani perusahaan dengan Badan Pengatur Jalan Tol, nilai pengadaan lahan proyek tersebut adalah Rp3,69 triliun.

Di luar pengadaan lahan, investasi pembangunan jalan tol Japek Selatan mencapai Rp14,70 triliun.

Menjelang penutup tahun 2018, PT Jasamarga Japek Selatan pun mendapat kredit sindikasi senilai Rp1,16 triliun untuk dana talangan tanah setelah ditandatangani perjanjian dengan kalangan perbankan.

Kredit sindikasi itu dikucurkan oleh tiga bank yakni PT Bank



Jalan tol Jakarta—Cikampek Elevated diperkirakan bisa difungsikan Lebaran mendatang.



Mandiri Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Tiap-tiap bank memberi kredit sekitar Rp1,38 triliun.

Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan Dedi Krisnawan Sunoto menyampaikan apresiasi atas dukungan perbankan dalam pembiayaan dana talangan itu.

"Kami berharap dengan dukungan pembiayaan ini, proyek jalan tol sepanjang 62 kilometer ini bisa selesai sesuai rencana," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Dedi menerangkan bahwa nantinya, jalan tol itu dapat berfungsi untuk mengurangi kepadatan panjang yang berada di sepanjang jalan tol Jakarta—Cikampek yang sudah ada terlebih dulu.

Selain menjadi jalur alternatif bagi pengguna tol yang akan menuju Cikampek maupun Bandung,

jalan tol ini juga dapat menunjang distribusi arus barang dan jasa, baik yang menuju maupun keluar dari Jakarta dan Jawa Barat serta berlanjut dari atau ke Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

JALAN TOL LAYANG

Selain mengerjakan Japek Selatan, JSMR melalui anak usahanya, yakni PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, juga tengah menyelesaikan pembangunan jalan tol Jakarta—Cikampek II Elevated sepanjang 36,37 kilometer.

Pemilihan pembangunan jalan tol layang tersebut—yang berada persis di tengah dan samping jalan tol Japek yang sudah ada—dikembangkan keberadaannya dapat mempersingkat waktu, seperti pembebasan lahan yang bisa dikurangi 1 tahun.

Hingga 4 Januari 2019, piker-

jaan konstruksi Japek Elevated telah mencapai 62%. Jalan tol melayang ini ditargetkan dapat digunakan fungsional pada masa Lebaran nanti.

"Japek Elevated diharapkan selesai pada 2019. Mei sudah bisa digunakan secara fungsional sehingga Lebaran perjalanan pengguna yang ingin melewati Trans-Jawa tidak mengalami kemacetan," ujar Direktur Pengembangan JSMR Adrian Prihatomo, Rabu (9/1).

Menurutnya, saat ini wilayah Jakarta—Cikampek sangat berkembang, seperti adanya kawasan industri sehingga pihaknya mengurusi tingkat kepadatan di jalan tol.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek Djoko Dwijono me-

masih berfokus pada pekerjaan pengangkutan steel box girder dengan sisa pekerjaan kurang lebih 1.200 buah dan pengecoran badan jalan.

"Kini, kami fokus untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik lagi, memperhatikan ketepatan konstruksi, pemakai jalan, dan lebih meningkatkan traffic management dalam pelaksanaan konstruksi untuk semaksimal mungkin mengurangi kelambatan lalu lintas," tutur Djoko, Rabu (9/1).

Setelah beroperasi, Japek Elevated dapat menampung limbah 30% yang menggunakan jalan tol Japek.

Saat ini, lalu lintas harian jalan tol Japek mencapai 600.000 kendaraan, sedangkan tambahan lajur dari Japek Elevated akan menambah kapasitas hingga 125.000 kendaraan per hari. **BI**

Judul	WIKA bidik 2 Bendungan	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	PT. Wijaya Karya Tbk membidik dua kontrak pembangunan bendungan sepanjang tahun ini, Direktur Operasi 1 PT. Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan bahwa perseroan belum bisa memproyeksi nilai kontrak pembangunan yang ingin diraih pada tahun ini.		

► SUMBER DAYA AIR

WIKA Bidik 2 Bendungan

JAKARTA — PT Wijaya Karya Tbk. membidik dua kontrak pembangunan bendungan sepanjang tahun ini.

Direktur Operasi I PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) Agung Budi Waskito mengatakan bahwa perseroan belum bisa memproyeksi nilai kontrak pembangunan yang ingin diraih pada tahun ini.

Pasalnya, Kementerian PUPR belum merilis secara resmi lelang pembangunan bendungan.

“Tahun ini, kami belum tahu karena sembilan bendungan tersebut ada yang masing-masing dibagi menjadi dua paket, mungkin tahun ini hanya dua bendungan saja,” kata Agung, Rabu (9/1).

Kementerian PUPR bakal melelang kontrak pembangunan sembilan bendungan sepanjang

tahun ini.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan bahwa lelang proyek pembangunan bendungan merupakan bagian dari program pembangunan 65 bendungan dalam periode 2015—2019.

“Beberapa yang akan dilelang, Pelosika, Riam Kiwa, di Papua juga ada. Yang mana dulu [proyek yang dilelang] tergantung kesiapannya,” ujarnya.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, sepanjang 2018, WIKA meraih lima paket pembangunan bendungan senilai Rp4,28 triliun. Kelima paket itu adalah kontrak pembangunan Bendungan Manikin paket I, Bendungan Tugu tahap II, Bendungan Sadawarna paket I, Bendungan Randugunting, dan

Bendungan Tiga Dihaji paket IV.

Berdasarkan nilai kontrak, pembangunan Bendungan Manikin paket I menjadi kontrak bendungan terbesar yang diraih WIKA sebesar Rp1,02 triliun, sedangkan nilai kontrak empat paket lain berkisar Rp690,71 miliar—Rp970,32 triliun.

Perolehan kontrak bendungan baru pada 2018 turut menambah portofolio WIKA di sektor bendungan. Sebelumnya, BUMN itu telah memenangi kontrak pembangunan Bendungan Sukamahi, Cipanas, dan Kuningan.

Secara keseluruhan, Kementerian PUPR telah melelang 15 proyek pembangunan bendungan. Dari jumlah itu, kontrak 14 proyek senilai Rp22,19 triliun telah ditandatangani. *(Rivki Maulana)*

Judul	Tol Penghubung Provinsi: Jateng Setujui Ruas Bawen-DIY	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 8)		
Resume	Pemprov Jateng akhirnya menyetujui pembangunan jalan tol Bawen- Yogyakarta dan Solo-Yogyakarta. PEMprov Jateng berharap agar Exit tol Tetap dekat dengan bangunan cagar budaya. Adapun tol Bawen-Yogyakarta sepanjang 77 km ini dimulai dari Mbarawa, Pringsurat, Magelang, dan Mungkid. Di Yogyakarta melewati Bendung, Karangtalun, Minggir, dan Sleman. kemudian memanjang sampai ringroad utara. Total Investasi diperkirakan lebih dari Rp. 12,13 triliun. adapun tol Solo-Yogyakarta penjangnya mencapai 54 Km dengan nilai investasi Rp. 19 triliun.		

► TOL PENGHUBUNG PROVINSI

Jateng Setujui Ruas Bawen-DIY

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jateng akhirnya menyetujui pembangunan jalan tol Bawen—Yogyakarta dan Solo—Yogyakarta. Pemprov Jateng berharap agar *exit tol* tetap dekat dengan bangunan cagar budaya.

Adapun, tol Bawen-Yogyakarta yang sepanjang 77 kilometer ini dimulai dari Ambarawa, Pringsurat, Magelang, dan Mungkid. Di Yogyakarta, melewati Bendung, Karangtalun, Minggir, dan Sleman. Kemudian memanjang sampai *ringroad* utara. Total investasi diperkirakan lebih dari Rp12,13 triliun.

Adapun, tol Solo-Yogyakarta panjangnya mencapai 54 kilometer dengan nilai investasi Rp19 triliun. Diawali dari Solo, Klaten dan Yogyakarta. Menurut rencana, ada bagian ruas yang melayang.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sepakat, jika rusak nanti

ruas tol Solo-Jogja tak melewati kawasan Candi Prambanan.

Hal tersebut sesuai dengan keinginan Pemda DIY supaya tidak merusak situs-situs penting di sana. Begitu pula dengan tol Bawen-Yogyakarta, pihaknya juga setuju manakala jalurnya tak bersinggungan dengan area Candi Borobudur.

“Tidak langsung nerabas lewat candi dan situs. Tapi di pinggirannya dan ada *exit tol* yang bisa menuju tempat wisata yang menuju Borobudur dan Prambanan. Itu kan menarik,” kata Ganjar, Rabu (9/1).

Selain dua wisata andalan itu, diharapkan nanti *exit tol* juga bisa menjangkau daerah wisata pendukung di Jateng dan DIY lainnya.

“Aksesibilitas harus bisa menuju ke dua titik itu [Prambanan dan Borobudur]. Secara teknis biarkan insinyur menghitung, kita kasih rambu-rambu,” tambahnya.

Kendati demikian, Ganjar belum menerima rancangan trase untuk infrastruktur calon penghubung Provinsi Jateng dan Provinsi DIY ini. Lantaran, *detail engineering design* belum rampung.

“Semua yang masih konsep saya biarkan, kalau mereka sudah bikin desain saya undang untuk paparan.”

Saat ini, Kementerian PU menghitung aksesibilitas kecepatan dan *traffic management*. Kalau sudah detail dan eksekusi akan saya minta untuk paparan. Dengan demikian, hal-hal yang ditakutkan publik bisa dikomunikasikan dengan baik.

Pada perkembangan lain, sebagian Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang bakal menggunakan bahan bakar gas. Pemerintah Kota Semarang resmi menggandeng Pemkot Toyama, Jepang.

Adapun, jumlah BRT yang

akan dikonversi dari bahan bakar minyak menjadi gas ada 72 unit dari total 144 BRT yang dimiliki oleh Pemkot Semarang.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, perubahan bahan bakar dari minyak menjadi gas akan mengurangi polusi di Kota Semarang. Hendrar memaparkan, untuk program ini Pemkot mengalokasikan Rp5 miliar begitu pun dengan Pemkot Toyama.

“Untuk pembiayaan program ini kami berbagi 50% dari APBD pemkot dan 50% bantuan dari Pemkot Toyama, sehingga kegiatan ini dapat terealisasi,” kata Hendrar, Rabu (9/1).

Hendi mengatakan, nanti akan ada tiga terminal pengisian gas untuk Trans Semarang di wilayah Tambak Aji, dan Mangkang. Kendati demikian, untuk tahap pertama baru bisa mengisi gas di kawasan Tambak Aji. (a28)